



**PERTUMBUHAN, PEMERATAAN, DAN PEMBANGUNAN WILAYAH  
DALAM PERSPEKTIF  
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI**

**PIDATO PENGUKUHAN**

Diucapkan pada peresmian penerimaan  
Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro  
Semarang, 22 September 1990

Oleh :  
Soehardi

Yth. Saudara Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro

Yth. Para Anggota Senat Universitas Diponegoro

Yth. Saudara Dekan, Dosen, Mahasiswa dan Karyawan dilingkungan Universitas Diponegoro

Yth. Ibu-ibu dan Bapak-bapak Tamu Undangan

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh,

Pertama-tama izinkanlah saya mengajak hadirin yang terhormat untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas ridhoNya kita dapat memenuhi undangan Rektor/Ketua Senat Universitas Diponegoro untuk menghadiri Rapat Senat Terbuka pada hari ini.

Sidang Senat Universitas yang terhormat pada hari ini memperkenankan saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka memangku jabatan Guru Besar dalam bidang Ilmu Keuangan Negara/Ekonomi Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro .

Uraian yang akan saya sampaikan pada Sidang yang terhormat hari ini akan berkisar pada bidang yang saya tekuni dan masalah-masalah kemasyarakatan yang menurut hemat saya baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang menuntut perhatian kita bersama.

Atas dasar pemikiran tersebut saya memilih **Pertumbuhan, Pemerataan, dan Pembangunan Wilayah dalam Perspektif Perkembangan Pemikiran Ekonomi** sebagai judul pidato pengukuhan.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada akhir-akhir ini banyak dibicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan salah satu aspek dari kehidupan manusia yaitu aspek ekonomi. Kesemuanya berkisar pada bagaimana dapat meningkatkan kehidupan dan berusaha mendapatkan jalan keluar bagi pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan perbaikan kehidupan. Setiap usaha untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi terasa akan keperluan alat analisis yang dapat memudahkan identifikasi persoalan secara lebih tepat, merumuskan kebijaksanaan lebih memadai dan lebih operasional serta menetapkan langkah kegiatan lebih efektif ke arah sasaran. Segala sesuatu tersebut akan berhubungan dengan teori ekonomi, karena pada hakekatnya fungsi teori adalah alat untuk analisis, alat untuk mengurai masalah yang dihadapi, mengadakan sintesis atas pemikiran yang berkembang, serta merumuskan langkah kebijaksanaan operasional guna penyelesaian masalahnya.

Teori ekonomi dibangun atas dasar pemikiran bahwa apa yang disebut barang ekonomi itu memiliki sifat relatif jarang (*scarce*). Hal ini berarti bahwa barang ekonomi itu dalam jumlah yang relatif kecil dibanding dengan apa yang diperlukan. Keadaan yang demikian ini

menimbulkan sikap untuk memilih diantara berbagai alternatif yang berarti bahwa apabila memilih salah satu alternatif dengan sendirinya alternatif yang lain dikorbankan . Uraian tersebut memberi petunjuk bahwa masalah pokok yang melandasi ilmu ekonomi adalah masalah memilih, masalah alokasi sumberdaya. Setiap alternatif yang dipilih diharapkan merupakan pilihan alokasi sumberdaya yang paling efisien, dan diukur dengan membandingkan antara hasil dan korban, antara manfaat dan biaya. Efisiensi akan diperoleh pada keadaan dimana semua sumberdaya digunakan dengan sebaik-baiknya, tanpa ada pemborosan. Efisiensi merupakan idola dalam ilmu ekonomi yaitu suatu keadaan dimana pemborosan adalah yang paling minimum. Efisiensi bukan tujuan akhir dari pada suatu tindakan ekonomi. Tujuan akhir dari suatu kegiatan ekonomi adalah apakah masalah yang dihadapi dapat diselesaikan. Hal ini berarti bahwa setiap langkah kegiatan ekonomi ditujukan untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan penggunaan sumberdaya, yaitu alokasi dan realokasi sumberdaya yang se-efisien mungkin.

Pengambilan keputusan tentang alokasi sumberdaya dilakukan melalui institusi pasar dan dapat pula dilakukan melalui institusi pemerintahan. Pengambilan keputusan alokasi melalui institusi pasar disebut sektor privat dimana kekuatan permintaan dan penawaran serta mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh kedaulatan konsumen dan motif keuntungan dari para produsen memberi corak alokasi sumberdaya.

Pengambilan keputusan alokasi melalui institusi pemerintahan disebut sektor publik. Dalam sektor publik ini kegiatan penerimaan dan pengeluaran negara akan memberi corak proses alokasi sumberdaya.

Sebagaimana telah diketahui dewasa ini corak sistem perekonomian mengambil bentuk sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran dengan sendirinya akan terjadi interaksi antara sektor privat dimana pengambilan keputusan didasarkan mekanisme harga (market principle) dengan sektor publik, dimana pengambilan keputusan alokasi sumberdaya didasarkan kepada penerimaan dan pengeluaran negara (budget principle). Perbedaan 'market principle' dengan 'budget principle' digambarkan oleh Colm sebagai berikut :

'The essence of the budget principle is that the services in this sphere are determined not by profit expectation and willingness of individuals to spend their money for the purchase of such services, but by decisions reached through political and administrative procedures and based on common social objectives' (Burkhead, Government Budgeting, 1959, hal. 34-35)

Hadirin yang saya muliakan,

Apabila disimak secara teliti, maka dalam sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dapat dicatat adanya dua masalah kemasyarakatan yang menjadi pusat perbincangan yaitu masalah pertumbuhan dan masalah distribusi/pemerataan. Kedua masalah kemasyarakatan tersebut dapat dilacak dari pemikiran-pemikiran sebagai berikut.

Bilamana kegiatan ekonomi itu didefinisikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan kemakmuran, maka kaum Merkantilis (abad 16-17) mengartikan kemakmuran dengan kekayaan yang berupa logam mulia. Atas dasar pemikiran ini maka kaum Merkantilis membangun konsepsi untuk memberi jawaban bagaimana dapat memperoleh logam mulia yang sebesar-besarnya. Untuk tujuan ini maka inti permasalahannya ditujukan kepada perdagangan, mengingat bahwa logam mulia hanya dapat diperoleh melalui perdagangan. Untuk itu perdagangan luar negeri mendapat perhatian utama, sehingga usulan pendapat untuk memperoleh kemakmuran yaitu logam mulia yang sebanyak-banyaknya adalah dengan mendorong ekspor. Peningkatan ekspor merupakan acuan segala gerak tindakan ekonomi.

Uraian tersebut memberi gambaran bahwa perkembangan ekonomi, atau pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan ekspor.

Agak lain dengan pemikiran Kaum Merkantilis adalah pemikiran yang diajukan oleh Adam Smith (1723-1790). Adam Smith mengartikan kemakmuran dengan banyaknya barang yang dihasilkan dan disediakan untuk masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi pokok perhatian Adam Smith adalah bagaimana produksi barang itu dapat ditingkatkan. Adam Smith sampai pada kesimpulan bahwa kenaikan produksi dapat dicapai bila diadakan pembagian kerja. Apabila faktor-faktor produksi itu terdiri dari alam, tenaga kerja dan modal, maka Adam Smith memberi

perhatian kepada faktor tenaga kerja. Pembagian kerja akan dapat meningkatkan produktivitas dan apabila hal ini didukung oleh pembentukan modal maka jumlah barang yang dihasilkan dan disediakan untuk masyarakat akan meningkat pula, yang berarti kemakmuran akan bertambah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja dan pembentukan modal merupakan faktor utama bagi pertumbuhan ekonomi. Segala pola tindak dalam bidang ekonomi diarahkan kepada pencapaian pembagian kerja yang sebaik-baiknya serta usaha pembentukan modal. Orientasi pemikiran ini ditujukan kepada perkembangan bisnis, sehingga yang dimaksud pembagian kerja adalah pembagian kerja teknis yang berlaku dalam proses produksi. Dengan berkembangnya dunia bisnis akan terdorong usaha menabung yang merupakan sumber pembentukan modal.

Ricardo (1782-1823) merupakan tokoh yang banyak menyetujui pemikiran Adam Smith. Apabila pembagian kerja dilakukan dilingkungan dunia internasional maka masing-masing negara akan menghasilkan barang yang paling menguntungkan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing negara dan yang akan berakibat dapat disediakannya barang yang relatif ongkos produksinya murah, serta akan menambah tingkat kemakmuran. Pembagian kerja internasional adalah inti pokok pemikiran Ricardo dalam upaya perkembangan atau pertumbuhan ekonomi.

Pemikiran-pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pembagian kerja, pembentukan modal, serta keadaan pasar akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Pendapat Adam Smith yang mengartikan kemakmuran sebagai jumlah ketersediaan barang di dalam masyarakat dianut hingga dewasa ini.

Masih dalam hubungannya dengan peningkatan produksi sebagai indikator perkembangan perekonomian John Stuart Mill (1806-1873) mengajukan peranan dari para pengusaha, sedang Schumpeter (1883-1950) mengajukan pemikiran tentang pengusaha yang inovatif. Pengusaha yang inovatif yang dimaksud oleh Schumpeter adalah mereka-mereka yang melakukan kombinasi baru terhadap bentuk barang ; pengenalan barang baru; pengenalan metoda produksi baru; pembukaan pasar baru.

Sejak awal, pemikiran tentang masalah pengembangan atau pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari aspek kependudukan. Adam Smith adalah seseorang yang mempunyai pandangan optimis, oleh karena itu dia tidak begitu memasalahkan aspek kependudukan malahan ia berpendapat bahwa penduduk yang banyak dapat merupakan pasar bagi hasil produksi. Seseorang yang sangat banyak menaruh perhatian terhadap aspek kependudukan adalah Malthus (1766-1834), yang menyebutkan bahwa penduduk akan bertambah menurut deret ukur



sedang persediaan bahan makanan akan bertambah menurut deret hitung. Pandangan Malthus yang pesimis ini berpengaruh terhadap pemikiran Ricardo. Dalam lingkup pemikiran perkembangan ekonomi Ricardo berpendapat bahwa faktor kependudukan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan dapat mencapai keadaan stasioner. Keadaan stasioner ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi sudah mencapai titik yang tertinggi.

Aspek perkembangan produksi serta aspek perkembangan kependudukan dalam lingkup peninjauan perkembangan perekonomian menimbulkan problematik distribusi, pemerataan dan kemiskinan.

Agaknya masalah pembangunan ekonomi, masalah pertumbuhan ekonomi selalu seiring sejalan dengan masalah distribusi dan pemerataan. Sejak awal pemikiran ekonomi dua aspek dari pada kehidupan ekonomi ini selalu mendapatkan perhatian. Disela-sela pemikiran tentang aspek pertumbuhan yang diukur dengan peningkatan produksi kadang-kadang aspek pemerataan mencuat di permukaan perbincangan masalah ekonomi. Masalah pemerataan menyangkut masalah ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan menyangkut pula masalah distribusi pendapatan.

Dalam hubungan dengan distribusi pendapatan dikenal adanya dua macam distribusi yaitu distribusi personal dan distribusi fungsional. Distribusi personal berhubungan dengan distribusi pendapatan dan

kekayaan individu, sedangkan distribusi fungsional berhubungan dengan pemberian imbalan kepada faktor-faktor produksi yaitu kepada pemilik faktor produksi tanah, faktor produksi modal dan faktor produksi tenaga kerja.

Masalah distribusi pertama-tama diajukan oleh Mazhab Phisiokrat. Francois Quesney (1694-1774) sebagai tokoh Phisiokrat menggambarkan bagaimana hasil neto yang diperoleh masyarakat itu didistribusikan. Ada tiga kelompok penerima hasil neto yang diperoleh masyarakat :

1. kelas produktif yaitu kelas petani;
2. kelas pemilik tanah;
3. kelas steril yaitu industri dan perdagangan.

Mereka berpendapat bahwa kelas yang produktif adalah petani, karena mereka beranggapan bahwa hanya tanahlah yang produktif.

Berbeda dengan Kaum Phisiokrat adalah pendapat Adam Smith yang mengatakan bahwa dalam masyarakat ada tiga kelompok penerima pendapatan yaitu mereka yang mendapatkan penghasilannya dari sewa tanah, mereka yang penghasilannya diperoleh dari keuntungan dan mereka yang mendapatkan penghasilan dari upah. Karena pemikiran Adam Smith lebih memperhatikan tentang produksi, maka masalah distribusi tidak begitu memperoleh perhatian. Ricardo sebagai pengikut Adam Smith meneruskan pemikiran tentang distribusi fungsional.

Perbedaan pendapat Ricardo dengan Adam Smith yaitu bila Adam Smith mengatakan bahwa pembagian atau distribusi itu adalah masalah hukum alam bukan masalah keadilan, maka Ricardo mengatakan bahwa sewa tanah akan meningkat terus sesuai dengan perkembangan peradaban, upah akan dipengaruhi oleh hukum subsistence, sedang keuntungan merupakan sisa hasil setelah digunakan untuk membayar sewa tanah, dan upah.

John Stuart Mill yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran para perintis sosialisme dan alam pemikiran humanis berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi produksi adalah lain dengan yang mempengaruhi distribusi. Produksi dipengaruhi oleh hukum alam yang dalam hal ini hukum permintaan dan penawaran, sedang distribusi dipengaruhi oleh kaidah-kaidah kemanusiaan. Masalah distribusi pendapatan, masalah ketidak-merataan dari pendapatan disoroti pula oleh John Maynard Keynes (1883-1946) dan justru dikaitkan dengan kehidupan ekonomi secara menyeluruh. Dengan mengambil permasalahan inti adanya pengangguran dan dihubungkan dengan perekonomian yang bersifat ekonomi uang, maka Keynes sampai pada kesimpulan bahwa masalah depresi (1930), masalah pengangguran timbul karena masalah tenaga beli. Perkembangan arus tenaga beli ini dipengaruhi oleh ketidakmerataan dari penghasilan. Manakala terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan maka arus tenaga beli akan kecil yang berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan yang berarti akan timbul kemacetan. Atas dasar pemikiran keadilan sosial maka Keynes

mengajukan langkah-langkah redistribusi pendapatan baik melalui kebijaksanaan moneter maupun kebijaksanaan fiskal.

Hadirin yang saya muliakan,

Perlu dicatat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara pemikiran Keynes dengan pemikiran sebelumnya biarpun masalah yang dihadapi adalah sama. Salah satu aspek yang melandasi perbedaan pemikiran tersebut adakah masalah peranan dari negara. Pemikiran sebelum Keynes lebih berorientasi pada sektor privat dan sangat membatasi peranan dari sektor publik. Melalui asas netralitas pemikiran sebelum Keynes berpendapat bahwa anggaran belanja negara harus bersifat netral yang berarti bahwa baik segi penerimaan maupun pengeluaran negara tidak boleh mempengaruhi pengambilan keputusan dari para individu apakah itu konsumen atau apakah itu produsen.

Berbeda dengan pendapat tersebut Keynes berpendapat bahwa sektor publik memegang peranan dalam upaya penyelesaian masalah-masalah ekonomi terutama yang berhubungan dengan masalah yang tidak dapat diselesaikan atas dasar prinsip pasar. Hal ini memberi petunjuk makin luasnya sektor publik yang berarti pula makin luas peranan dari penerimaan dan pengeluaran negara terhadap perkembangan ekonomi. Kalau pendapat sebelum Keynes mengajukan asas netralitas anggaran belanja negara, maka Keynes menekankan peranan aktif dari penerimaan dan pengeluaran negara guna penyelesaian masalah-

masalah kemasyarakatan yang dihadapi. Dalam hubungannya dengan peran aktif dari anggaran belanja negara itu Musgrave mengemukakan pendapat bahwa fungsi anggaran belanja negara adalah :

1. fungsi alokasi, yang berhubungan dengan penentuan perbandingan luas penyediaan barang sosial dan barang privat.
2. fungsi distribusi yaitu yang berhubungan dengan aspek distribusi pendapatan dan kekayaan yang sesuai dengan asas keadilan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan;
3. fungsi stabilisasi yang berhubungan dengan pencapaian stabilisasi harga, pencapaian kesempatan kerja pada tingkat yang tinggi serta perekonomian yang berkembang.

Burkhead berpendapat bahwa anggaran belanja negara itu tidak pasif melainkan dinamik. Anggaran belanja negara menggambarkan dan membentuk perekonomian nasional. Dari segi penerimaan dapat diidentifikasi pengaruhnya terhadap tingkat dan aktivitas ekonomi sektor privat. Dilihat dari segi pengeluaran negara, maka kegiatan pengeluaran negara itu dapat mempengaruhi jenis-jenis kegiatan yang dilakukan di sektor privat pun pula akan mempengaruhi secara menyeluruh tingkat aktivitas ekonomi.

Dalam era pembangunan anggaran belanja negara mempunyai pengaruh yang kuat seperti dinyatakan dalam World Development Report sebagai berikut :

'Public Finance shapes the course of development. It affects aggregate resource use and financing patterns and, together with monetary and exchange rate policies, influences the balance of payments, the accumulation of foreign debt, and the rates of inflation, interest, and exchange. Public spending, taxes, user charges, and borrowing also affect the behavior of producers and consumers and influence the distribution of wealth and income in an economy. (World Development Report 1988, hal.1)

Memperhatikan hal tersebut maka permasalahan pertumbuhan dan pemerataan tetap merupakan tujuan dan sasaran sosial yang melandasi penerapan budget principle dalam pembangunan. Justru terhadap masalah pemerataan diberi perhatian yang lebih dan dirumuskan secara tajam permasalahannya serta konsepsi pemecahannya. Dalam hubungan ini sangat menonjol adalah masalah perluasan kesempatan kerja, masalah distribusi kegiatan pembangunan serta hasil-hasil pembangunan, masalah pembangunan yang berkelanjutan, serta masalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hadirin yang saya muliakan,

Untuk tujuan-tujuan tersebut Harrod dan Domar menyajikan konsepsi pertumbuhan yang mantap yang berarti terjadinya suatu situasi yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan pendapatan nasional yang

disertai terjadinya perluasan kesempatan kerja atau diperolehnya kesempatan kerja penuh.

Konsepsi yang diajukan oleh Harrod dan Domar ini dapat dikatakan sebagai suatu perluasan dari teori Keynes. Bila teori Keynes lebih banyak berorientasi kepada pemikiran jangka pendek, maka konsepsi pemikiran Harrod dan Domar berorientasi pada pemikiran jangka panjang. Seperti halnya pemikiran jangka pendek yang diajukan oleh Keynes, Harrod dan Domar memberi pengertian investasi sebagai usaha menaikkan permintaan efektif. Peningkatan permintaan efektif akan mendorong perluasan kesempatan kerja. Di pihak lain Harrod dan Domar dalam lingkup pemikiran jangka panjang memberi pengertian pembentukan modal sebagai penambahan persediaan modal yang berakibat makin kuatnya kemampuan untuk memproduksi. Atas dasar pemikiran tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa kondisi pertumbuhan yang mantap yang berarti terjadinya kenaikan produksi dan kesempatan kerja yang makin luas ditentukan oleh tabungan disatu pihak dan rasio antara modal dan produksi/output dilain pihak.

Berbeda dengan pemikiran Harrod dan Domar dalam upaya menjamin adanya pembangunan yang mantap yang berarti terjadinya peningkatan produksi dan tingkat kesempatan kerja penuh maka kelompok pemikir yang tergolong dalam Neo-Klasik berpendapat bahwa hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaannya faktor-faktor produksi, dimana faktor produksi teknologi sangat mendapatkan perhatian.

Kalau apa yang diuraikan di atas merupakan pemikiran tentang pertumbuhan sekaligus dihubungkan dengan upaya mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh, maka terdapat pemikiran yang berupaya untuk mendapatkan konsepsi yang menuju kepada pertumbuhan dan pemerataan. Konsepsi ini berpangkal pada pemikiran bahwa redistribusi pendapatan melalui kebijaksanaan moneter dan kebijaksanaan fiskal belum mampu untuk mengadakan pemerataan, yaitu belum dapat menyentuh kehidupan golongan miskin.

Untuk tujuan tersebut dikembangkan suatu pengukuran sampai seberapa jauh pemerataan itu telah dicapai, melalui konsepsi garis kemiskinan. Diadakan pembedaan atau penggolongan masyarakat yang kehidupannya di atas garis kemiskinan dan golongan masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kehidupan di bawah garis kemiskinan diartikan kehidupan dibawah garis minimum yang harus dipenuhi bagi kehidupan yang sederhana. Oleh karena itu jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menggambarkan tingkat ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Adapun tingkat ketimpangan pembagian pendapatan diukur dengan kriteria sebagai berikut : Bilamana bagian pendapatan nasional bagi kelompok berpendapatan rendah 40% adalah 17% atau lebih maka dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pembagian pendapatan tergolong rendah. Apabila bagian pendapatan nasional bagi kelompok berpendapatan rendah 40%



terletak antara 12-17% maka dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pembagian pendapatan adalah sedang. Apabila bagian pendapatan nasional bagi kelompok 40% terletak dibawah 12% dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pembagian pendapatan adalah tinggi. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas maka perlu intervensi pemerintah yang berarti tidak hanya diserahkan kepada bekerjanya mekanisme harga saja. Kebijakan perluasan kesempatan kerja, kebijakan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan pokok merupakan langkah untuk dapat mengatasi ketimpangan pembagian pendapatan.

Tuntutan pembangunan yang lain selain pertumbuhan dengan kesempatan kerja penuh, serta pertumbuhan dengan pemerataan adalah tuntutan pembangunan yang berkelanjutan yang berarti bahwa pembangunan tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi generasi dimasa mendatang. Sebagaimana diketahui tuntutan pertumbuhan berdampak pendayagunaan sumberdaya yang makin besar. Setiap kenaikan output akan menambah kenaikan input yang berwujud sumberdaya. Dalam hubungan ini perlu dicatat adanya sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. Pendayagunaan sumberdaya baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui akan dapat merusak lingkungan yang akan berakibat kurang berhasilnya pembangunan di masa mendatang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendayagunaan sumber-

daya yang berlebih antara lain laju pertumbuhan penduduk. Suatu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, penambahan penduduk yang besar dan diikuti peningkatan kualitas tingkat hidupnya akan menuntut tambahan penyediaan barang dan jasa yang berarti pula peningkatan pendayagunaan sumberdaya.

Hal lain yang dapat mendorong pendayagunaan sumberdaya yang tinggi khususnya bagi negara yang berpendapatan rendah adalah usaha untuk mengurangi kesenjangan antara negara yang berpendapatan rendah dengan negara yang berpendapatan tinggi. Keadaan yang demikian ini memberi gambaran bahwa kemelaratan itu pula yang mendorong pendayagunaan sumberdaya yang berlebih.

Aspek lain yang mendorong pendayagunaan sumberdaya yang berlebih adalah bilamana terjadi pemborosan yang besar dalam pendayagunaan sumberdaya alam. Dalam hubungan ini salah satu aspek yang dapat menimbulkan pemborosan pendayagunaan sumberdaya alam adalah kurangnya pengetahuan dari penduduk serta tingkat teknologi yang digunakan.

Atas pemikiran tersebut maka guna penanggulangan degradasi sumberdaya alam diambil langkah-langkah dalam bidang kependudukan yaitu menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pendidikan dan latihan sebagai upaya peningkatan wawasan serta kemampuan dan ketrampilan teknologi masyarakat.

Hadirin yang saya muliakan,

Apabila diteliti ulang apa yang telah diuraikan di atas maka permasalahan pertumbuhan dan pemerataan tetap menonjol dalam era pembangunan ini dan justru aspek pemerataan mendapatkan pengamatan yang lebih tajam yaitu dihubungkan dengan pemerataan dilihat dari segi kesempatan kerja, pemerataan dilihat dari segi pemerataan hasil-hasil pembangunan, pemerataan dilihat dari segi penyebaran kegiatan pembangunan, serta pemerataan dilihat dari antar generasi yang memerlukan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian dapat disimpulkan pula bahwa masalah pertumbuhan selalu berjalan seiring dengan masalah pemerataan. Keadaan tersebut menuntut diadakannya pengamatan secara terpadu dalam menelaah baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Keterpaduan pengamatan dua aspek tujuan dan sasaran pembangunan yaitu pertumbuhan dan pemerataan dapat didekati melalui dimensi ruang yaitu lingkungan, tempat atau wilayah dimana kegiatan yang berakibat pertumbuhan dan pemerataan itu dilakukan. Untuk hal ini diperkembangkan pendekatan wilayah bagi pembangunan nasional. Pendekatan wilayah pembangunan nasional sangat mendapatkan perhatian seperti yang diajukan oleh M.L. Logen sebagai berikut :

*'In Developing countries interest is growing in the way geographical space can be organized to increase national rates of*

economic growth and to ensure that the benefits of growth are passed on to the greatest number of people.' ( Regional Analysis and Development, hal.283 )

Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa dengan melalui pendekatan ruang dapat diupayakan tercapainya laju pertumbuhan yang tinggi serta pemerataan pembangunan. Seperti diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dapat diperoleh melalui peningkatan intensitas pendayagunaan sumberdaya yang telah tersedia, melainkan dapat dicapai justru dengan mencoba mengupayakan pendayagunaan sumberdaya yang belum sepenuhnya diusahakan, sumberdaya yang masih tersembunyi atau yang masih terpecah dimana-mana. Melalui pendekatan wilayah hal-hal tersebut dapat diidentifikasi secara lebih baik.

Selain hal tersebut di atas pembangunan nasional bagi negara-negara yang sedang berkembang berarti adanya suatu perubahan struktur ekonomi yaitu struktur ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan sektor industri. Keadaan yang demikian ini akan membawa dampak terjadinya pergeseran-pergeseran pusat-pusat kegiatan ekonomi yang semula lebih bersifat pertanian ke arah industrial.

Bagi negara-negara bekas jajahan pembangunan dapat diartikan pula transformasi dari ekonomi yang bersifat kolonial ke perekonomian yang bersifat nasional. Perekonomian yang semula bercorakkan ekonomi kolonial dan berorientasi pada ekspor ditransformasikan

keperekonomian nasional yang mengabdikan kepada kemakmuran rakyat banyak. Dalam hubungan ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana merefungsionalisasikan infrastruktur perekonomian yang telah ada.

Keadaan geografis suatu negara juga sangat memberikan warna pada pendekatan wilayah dalam pembangunan, misalnya negara yang merupakan negara kepulauan akan berbeda dengan negara yang kontinental dalam memandang kepentingan pendekatan wilayah.

Hadirin yang saya muliakan,

Beberapa aspek yang melandasi pemikiran pendekatan wilayah antara lain adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem berpendapat bahwa suatu keadaan sebagai suatu sistem akan terdiri dari sub-sistem. Masing-masing sub-sistem akan saling berhubungan dan mengadakan interaksi satu sama lain untuk tercapainya tujuan bersama. Hal yang demikian ini berarti bahwa bilamana suatu wilayah negara terdiri dari sub-sub wilayah, maka sub wilayah yang satu dengan yang lain akan saling berhubungan dan berinteraksi satu dengan yang lain seiring sejalan menuju pencapaian tujuan nasional.

Aspek lain yang melandasi pemikiran pendekatan wilayah adalah gerak konvergensi/pemusatan dan gerak divergensi/penyebaran dalam

masyarakat. Gerak konvergensi memberi gambaran tentang arus gerak menuju kepada suatu titik tertentu. Dalam kegiatan ekonomi khususnya kegiatan perindustrian gerak ini tergambar adanya pemusatan industri pada suatu tempat tertentu. Pemilihan tempat kedudukan perusahaan pada tempat tertentu pada umumnya disebabkan pertimbangan-pertimbangan biaya. Pemusatan-pemusatan perusahaan pada suatu tempat tertentu akan dapat menikmati beberapa keuntungan antara lain :

1. Keuntungan yang diakibatkan oleh makin banyaknya perusahaan sejenis yang berlokasi ditempat yang bersangkutan (Localization economies).
2. Keuntungan yang diakibatkan makin banyaknya perusahaan yang beragam yang mengambil lokasi ditempat yang bersangkutan. (Urbanization economies).

Proses gerak divergensi dengan sendirinya akan terjadi manakala perusahaan tidak menikmati lagi keuntungan-keuntungan baik yang berupa 'localization economies' maupun 'urbanization economies'.

Pemikiran tersebut menimbulkan persoalan dimana investasi akan dilakukan atau dapat dikatakan persoalan mengenai kemana investasi itu akan diarahkan. Untuk permasalahan ini ada dua macam pendapat :

1. mereka yang berpendapat bahwa investasi sebaiknya diarahkan kepada daerah atau tempat yang telah maju yaitu tempat dimana perusahaan akan menikmati baik 'localization economies' maupun 'urbanization economies',
2. mereka yang berpendapat sebaiknya investasi diarahkan pada daerah atau tempat yang belum maju.

Pendapat pertama lebih berorientasi kepada efisiensi, kepada pertumbuhan produksi karena dengan adanya keuntungan ruang seperti tersebut di atas akan mendorong berkembangnya perusahaan di daerah yang bersangkutan. Pendapat ini juga dikatakan sebagai pendapat yang mengambil dimensi waktu jangka pendek.

Agak lain adalah pendapat yang kedua yang berorientasi pada pengarahannya investasi pada daerah yang belum maju. Pendapat ini lebih mendasarkan diri pada dimensi jangka panjang. Selain itu pendapat yang kedua ini juga berorientasi pada keadilan dan pemerataan. Pendapat ini berpangkal pada pemikiran bahwa kesenjangan tingkat kehidupan antar wilayah merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.

Pendapat bahwa investasi sebaiknya dilakukan pada daerah yang telah maju dan pendapat yang menghendaki investasi diarahkan pada daerah yang belum maju membuka persoalan untuk mencoba mende-  
katkan diantara kedua pendapat tersebut. Kalau persoalan penempatan lokasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan,

maka salah satu cara untuk mendekati persoalan tersebut dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas yang memungkinkan terjadinya keuntungan eksternal perusahaan yaitu penyediaan infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi yang langsung berhubungan dengan kelancaran proses produksi maupun infrastruktur sosial yang menunjang perkembangan investasi.

Hadirin yang saya muliakan,

Berbicara tentang agglomerasi yaitu gerak mengumpulnya perusahaan di satu tempat tertentu maka pemikiran akan tertuju pada masalah kota dan perkotaan. Kota dan perkotaan mempunyai kelebihan bagi suatu investasi dibanding dengan yang bukan perkotaan mengingat perkotaan pada umumnya memiliki beberapa keuntungan baik yang berhubungan dengan prasarana, fasilitas yang menunjang usaha serta tenaga terampil yang diperlukan. Atas dasar pemikiran ini maka kota dan perkotaan mempunyai ciri khusus yaitu: bahwa corak perekonomian lebih bersifat non-pertanian yaitu industri, perdagangan dan jasa-jasa.

Melihat kota selain dilihat aspek corak perekonomiannya maka dalam rangka pengamatan wilayah perlu pula diperhatikan akan fungsi kota dalam rangka pembangunan. Kota akan berinteraksi dengan kota lainnya baik secara horisontal maupun secara vertikal. Hubungan kota dengan kota lain secara horisontal akan menunjukkan hubungan inter-



dependensi. Hubungan interdependensi antar kota akan menunjukkan sistem kota serta jaringan antar kota. Masing-masing kota akan merupakan suatu simpul dalam jaringan kota tersebut. Sebagai suatu simpul dalam jaringan kota, maka masing-masing kota akan menghubungkan wilayah dimana kota yang bersangkutan menjadi pusatnya dengan kota-kota lainnya yang hal ini akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan wilayah yang bersangkutan.

Selain melihat kota dalam hubungannya dengan kota lain secara interdependen perlu disimak pula hubungan antar kota secara dependen. Hubungan dependen ini berkaitan dengan tingkat kemampuan pelayanan yang dapat dilakukan oleh masing-masing kota. Kota yang besar akan mempunyai cakupan pelayanan yang lebih luas dibanding dengan kota sedang, begitu pula kota sedang mempunyai jangkauan pelayanan yang lebih besar dibanding dengan kota yang lebih kecil. Hubungan dependensi antar kota ini menunjukkan hirarkhi kota.

Melihat hubungan antar kota baik dalam hubungannya secara interdependen maupun dalam hubungannya secara dependen atau melihat kota dalam sistem perkotaan maupun melihat kota dalam hirarkhi perkotaan perlu memberi perhatian kepada kota-kota kecil. Dibanding dengan kota-kota yang lebih besar maka kota-kota kecil sangat erat hubungannya dengan daerah sekelilingnya yaitu daerah pedesaan. Dilihat dari sistem perkotaan maka kota kecil tersebut merupakan simpul yang menghubungkan daerah pedesaan dengan kota-

kota lainnya atau dapat dikatakan yang menghubungkan desa dengan kota-kota lainnya dalam jaringan perekonomian nasional. Pemikiran yang demikian ini melihat desa dan kota dalam hubungan komplementer. Atas dasar potensi yang ada serta memperkembangkan potensi sumberdaya manusia diupayakan terjadinya pertumbuhan perekonomian pedesaan yang bercorakkan pertanian. Kota yang kehidupan perekonomiannya bercorak non-pertanian diperkembangkan sehingga dapat berfungsi menunjang usaha pembangunan pedesaan. Dengan memandang kota dan desa dalam hubungan komplementer maka kota merupakan pintu gerbang barang yang akan keluar dari daerah yang bersangkutan serta merupakan pintu masuk bagi barang dan jasa yang diperlukan bagi pengembangan pedesaan. Kota yang memiliki hubungan luas dengan kota lain diharapkan dapat memberi jasa dalam hal informasi, prasarana produksi dan teknologi bagi pembangunan pertanian yang dilakukan dipedesaan. Untuk kesemua itu maka diperlukan adanya :

1. prasarana yang berhubungan dengan produksi yang berupa jalan, jembatan, transportasi, irigasi serta prasarana pemasaran dan
2. prasarana yang berhubungan dengan usaha kesejahteraan masyarakat yang berupa air bersih, pendidikan, kesehatan, kantor pos dan sebagainya.

Usaha pembangunan dengan melihat interaksi antara perkotaan dalam lingkup sistem perkotaan, hubungan dependensi antara perkotaan

dalam lingkup hirarkhi perkotaan serta hubungan kota dengan wilayah sekelilingnya akan memungkinkan pembangunan dapat dilakukan secara merata diseluruh wilayah. Hubungan perkotaan dan pedesaan tidak ditempatkan dalam suatu dikotomi yaitu kelompok yang bertentangan melainkan dilihat dalam hubungan komplementer, yaitu hubungan yang saling melengkapi. Dengan memperhatikan kota kecil dalam wawasan pembangunan baik dalam hubungan sistem perkotaan maupun dalam hirarkhi perkotaan dan hubungan desa dan kota akan memungkinkan suatu perencanaan dari bawah yang akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta akan dapat menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan efisiensi lokal dan keadilan regional, yaitu apakah investasi dilakukan di daerah yang maju atau ke arah daerah yang belum maju. Untuk keseluruhan tersebut diperlukan pengembangan prasarana transportasi, komunikasi serta pengembangan organisasi yang memacu hubungan kota dengan kota lainnya serta kota dan daerah pedesaan.

Hadirin yang saya muliakan,

Pembangunan dengan pendekatan wilayah dikongkretkan dalam perencanaan wilayah. Untuk hal ini diperkembangkan satuan-satuan wilayah pembangunan serta sub-sub wilayah pembangunan. Suatu wilayah pembangunan harus cukup luas sebagai satuan pengambilan keputusan dalam investasi; harus memiliki luas yang cukup untuk dapat

memenuhi industri yang ada (termasuk industri pertanian) dengan kebutuhan tenaga kerja; harus mempunyai struktur ekonomi yang homogen dan memiliki sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan, serta memiliki satu cara pendekatan dan kesadaran terhadap problematik yang dihadapi.

Sebagaimana diketahui masalah pembangunan adalah masalah investasi. Seperti telah diuraikan di atas masalah investasi dalam wujud infrastruktur akan sangat membantu pencapaian tujuan pembangunan. Ada dua kelompok infrastruktur yaitu :

1. infrastruktur yang bersifat mendorong perkembangan misalnya ; jalan, jembatan, komunikasi, transportasi, irigasi;
2. infrastruktur yang bersifat kesejahteraan sosial misalnya pendidikan, kesehatan, air bersih, kantor pos dan sebagainya.

Untuk kepentingan pembangunan wilayah atau perencanaan wilayah ini maka di bidang ilmu ekonomi telah berkembang alat analisis sebagai cabang ilmu ekonomi yang disebut Ilmu ekonomi regional. Sebagai cabang ilmu ekonomi maka ekonomi regional diberi pengertian oleh David L Mc Kee sebagai berikut :

'Regional economics is, therefore, the study from the viewpoint of economics, of the differentiation and interrelationships of

areas in a universe of unevenly distributed and imperfectly mobile resources, with particular emphasis in application on the planning of the social overhead capital investments to mitigate the social problems created by these circumstances'. (Regional Economics, hal.7 )

Seperti telah diuraikan di atas dalam rangkaian upaya pembangunan guna mendapatkan pertumbuhan dan pemerataan diungkapkan peranan dari infrastruktur. Mengingat bahwa penyediaan infrastruktur itu lebih banyak dilakukan oleh pemerintah maka kembali dapat ditangkap peranan dari anggaran belanja negara. Melalui fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi dan fungsi pembangunan anggaran belanja dapat mengarahkan dimana infrastruktur itu akan dibangun. Dengan demikian berarti bahwa dalam penyusunan program-program pembangunan dimensi ruang merupakan salah satu pertimbangan fisibilitas suatu program pembangunan khususnya program-program pembangunan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur pada daerah yang telah maju berarti akan meningkatkan gerak konvergensi kegiatan ekonomi, sedangkan penyebaran infrastruktur dengan sebaran yang meliputi seluruh wilayah akan mendorong terjadinya proses divergensi dari kegiatan ekonomi. Dengan demikian berarti bahwa dimensi sektoral dalam pembangunan akan berjalan bersama-sama dengan dimensi ruang dalam pertimbangan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Penyebaran dan persebaran infrastruktur yang baik tidak hanya akan mempengaruhi lokasi perusahaan, tetapi akan berpengaruh pada

perkembangan perusahaan melalui asas keterkaitan (linkage), maupun melalui asas multiplier. Asas keterkaitan dapat berupa keterkaitan kebelakang yang berarti adanya suatu perusahaan akan mendorong tumbuhnya perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan yang bersangkutan, sedang asas keterkaitan kemuka berarti adanya suatu perusahaan akan mendorong tumbuhnya perusahaan lain yang mengolah hasil produksi perusahaan yang bersangkutan. Asas multiplier diartikan sebagai suatu keadaan dimana timbulnya suatu perusahaan akan mempergunakan sumberdaya (alam dan tenaga kerja) di daerah tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan yang akan mempunyai dampak meningkatnya tenaga beli masyarakat disekitarnya. Selanjutnya dengan kenaikan tenaga beli itu akan meningkatkan permintaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang akan mendorong dunia usaha.

Dari uraian di atas dapat diambil kesan bahwa pendekatan wilayah dalam usaha pembangunan sangat memberi perhatian akan adanya aspek interdependensi antar kota yang mewujudkan sistem perkotaan; adanya hubungan dependensi antar kota yang menggambarkan hirarkhi perkotaan; adanya hubungan antar kota dan desa yang menggambarkan sifat komplementer desa dan kota. Selain itu pendekatan wilayah memberi perhatian akan terjadinya keterkaitan (linkage) antar perusahaan baik keterkaitan kemuka maupun kebelakang, selanjutnya memberi perhatian pula akan bekerjanya asas pergandaan (multiplier) dari proyek investasi pembangunan yang dilakukan.

Dalam hubungannya dengan efektivitas pembangunan regional Robert Riddle menyatakan hal sebagai berikut :

'The effectiveness of regional development arises from the degree to which the population of a 'region' acknowledges that region's integrity within the socio-economic system. There must be harmony between national and sectoral policy and with adjacent regions and with planning for lesser district within a region; this all serves to bring development regions into functional focus. Perfect geographical boundaries are, thereby , relegated in favour of the integration of policy and consonance of effort. National loyalty and local patriotism are more important here than geographical watershed and administrative distinction - which introduces the ' subjective' versus 'objective' contention. (Regional Development Policy, hal. 11-12)

Hadirin yang saya muliakan,

Apa yang diuraikan di atas lebih banyak berhubungan dengan masalah perencanaan, masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi sumberdaya bagi pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan melalui pendekatan wilayah. Pada umumnya orang akan berhenti sampai suatu titik dimana alokasi sumberdaya itu telah diperhitungkan dalam suatu keadaan yang paling menguntungkan atas dasar pertimbangan efisiensi serta asas keadilan. Justru masalahnya adalah bagaimana perencanaan yang sudah baik itu dapat dilaksanakan.

Membicarakan persoalan ini maka yang mendapat perhatian tidak hanya masalah perencanaan tetapi juga masalah pelaksanaan. Yang dibicarakan bukan hanya masalah investasi yang akan dilakukan tetapi bagaimana melaksanakan investasi yang telah diputuskan itu. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa masalahnya adalah bagaimana pembangunan itu dapat digerakkan. Memperhatikan aspek ini yang dihadapi adalah masalah institusi atau kelembagaan. Institusi atau kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan permainan. Sebagai suatu aturan permainan institusi diberi arti oleh Ruttan and Hayami sebagai berikut :

'Institution are the rules of a society or of organizations that facilitate coordination among people by helping them form expectations which each person can reasonably hold in dealing with each other. ( Kutipan Brian Arkadie dalam *The Role of Institution in Development* hal 154).

Dalam tulisan yang sama Brian Arkadie memberi pengertian institusi dalam artian yang kedua yaitu institusi sebagai organisasi. Dari kacamata ekonomi organisasi merupakan bidang kegiatan dimana di dalamnya mekanisme pasar tidak mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan dari para pelakunya.

Memperhatikan institusi sebagai suatu alat atau wadah dimana pembangunan itu digerakkan akan berhubungan dengan masalah-masalah pengembangan institusi. Sebagai wadah pelaksanaan pembangunan atau sebagai suatu petunjuk untuk berbuat maka institusi akan sangat



berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan yang berarti apa yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya sehingga sasaran-sasaran perencanaan dapat direalisasikan dengan sebaiknya. Banyak hal-hal yang direncanakan tidak dapat tercapai karena kelemahan institutional. Banyak hubungan, interaksi, keterkaitan yang diharapkan terjadi tetapi harapan tersebut tidak dapat terwujud justru karena kelemahan institutional. Melihat hal ini semua maka begitu pentingnya kegiatan pengembangan institusi dengan mempengaruhi variabel institusi antara lain kepemimpinan, misi, serta sumberdaya antara lain hukum, ketenagaan, keuangan, perlengkapan dan informasi. Selain itu tidak dapat diabaikan aspek keterkaitan dengan institusi yang lain. Seperti diketahui dalam upaya pengembangan institusi variabel yang ingin dipengaruhi banyak yang di luar bidang ekonomi. Dalam hal ini akan mendorong para ahli-ahli ekonomi untuk berpikir secara interdisipliner guna pencapaian tujuan yang diinginkan dengan langkah-langkah yang efektif.

Hadirin yang saya muliakan,

Apabila diperhatikan uraian di atas dapat dicatat beberapa hal yang memerlukan perhatian untuk masa depan. Mengingat perkembangan penduduk baik dalam artian kualitatif maupun dalam artian kuantitatif; upaya peningkatan kehidupan dalam artian penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat banyak melalui upaya kenaikan produksi dan produktivitas; upaya transformasi perekonomian dari perekonomian

yang bersifat pertanian menuju perekonomian yang memiliki keseimbangan struktur antara pertanian dan industri; serta keinginan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan yang menjamin kesempatan kerja, pembagian hasil pembangunan dan kegiatan pembangunan yang merata, serta pembangunan yang berkelanjutan maka sangat diperlukan pembangunan dengan pendekatan wilayah. Pendekatan wilayah dalam pembangunan memberi kemungkinan untuk mengidentifikasi potensi mana yang sudah didayagunakan secara penuh, potensi mana yang belum didayagunakan secara penuh serta potensi mana yang masih tersembunyi yang berarti potensi yang menantang pendaayagunaannya bagi penyediaan barang dan jasa. Hal-hal tersebut memberi peluang guna menaikkan produksi dan produktivitas. Aspek lokasi dalam pendekatan wilayah memberi peluang untuk mengadakan alokasi investasi sesuai dengan asas efisiensi dan memberi peluang untuk mengadakan penyebaran serta persebaran kegiatan pembangunan secara lebih merata melalui pertimbangan dari segi sistem perkotaan, hirarkhi perkotaan serta hubungan kota dan desa yang komplementer. Hal tersebut juga akan memungkinkan hubungan antar wilayah yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan masing-masing wilayah secara bersama-sama.

Selain aspek perencanaan wilayah seperti tersebut di atas guna kesuksesan pembangunan yang berarti terlaksananya program serta proyek yang telah ditetapkan dengan baik untuk tercapainya tujuan yang ingin dicapai maka perlu perhatian akan aspek pelaksanaan, aspek

operasional. Aspek operasional akan banyak berhubungan dengan pengembangan institusi, baik institusi dalam pengertian aturan permainan maupun dalam pengertian organisasi. Pengembangan institusi akan berhubungan dengan aspek-aspek non ekonomi yang berarti hal ini menuntut diperkembangkannya metode interdisipliner. Metode interdisipliner tidak hanya diperlukan pada tahap pelaksanaan saja tetapi harus dipergunakan sejak tahap perencanaan pembangunan. Pendekatan wilayah lebih mendekatkan hubungan serta pertimbangan segi ekonomi, segi sosial, dan segi fisik.

Institusi yang baik dan mendukung pembangunan akan memberi petunjuk dengan jelas bagaimana harus berbuat dan akan mendorong partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Pendekatan wilayah akan dapat melengkapi pendekatan makro dan pendekatan sektoral dalam pembangunan nasional sehingga dimensi yang tidak terjangkau melalui pendekatan makro dan sektoral dapat didekati dengan pendekatan wilayah.

Tuntutan pertumbuhan dan pemerataan serta pendekatan wilayah akan mewarnai pemikiran-pemikiran di masa mendatang dan untuk itu kajian-kajian ekonomi untuk masalah-masalah tersebut sangat relevan guna menatap masa depan dan hal-hal ini merupakan tantangan bagi para pengembang ilmu ekonomi.

Kajian (studies) tentang pertumbuhan, pemerataan dan pembangunan wilayah adalah hal yang sangat penting mengingat strategi pembangunan Indonesia adalah pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari hampir 13700 pulau dengan pulau utama Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya serta gugusan kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara memiliki sumberdaya alam yang berbeda-beda, begitu pula tingkat kepadatan penduduk yang tidak sama dan adat kebiasaan yang berbeda pula. Hal ini berarti bahwa tingkat kemampuan berkembang masing-masing daerah tidak sama. Masing-masing daerah memerlukan penanganan yang berbeda dalam menunjang pembangunan daerah dalam lingkup pembangunan nasional.

Selain hal tersebut di atas tingkat laju pertumbuhan masing-masing daerah juga tidak sama. Hal ini berarti bahwa tingkat penun- jangan yang berwujud infrastruktur baik infrastruktur ekonomi maupun sosial juga berbeda tingkat urgensi dan tingkat intensitasnya bagi masing-masing daerah.

Kajian seperti tersebut di atas tidak hanya penting pada skala nasional saja melainkan penting pula artinya dalam perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II. Pembangunan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat

II memerlukan pendekatan wilayah untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, keterpaduan pembangunan antar wilayah pembangunan dalam upaya meningkatkan pendayagunaan sumberdaya yang telah tersedia serta menggali sumberdaya yang belum didayagunakan dan yang belum sepenuhnya didayagunakan guna mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan.

Banyak tantangan untuk masa depan, banyak hal yang dapat dikerjakan untuk masa depan dan hal ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi para pengembang ilmu pengetahuan.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada bagian akhir dari uraian ini, perkenankan saya mengajak isteri dan anak-anak saya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih atas rahmat, hidayah, dan inayahNya. Semoga kebahagiaan yang dilimpahkan kepada kami sekeluarga akan merupakan landasan bagi kesejahteraan dan kesentosaan kehidupan kami dimasa-masa yang akan datang.

Suatu keberhasilan pada hemat saya tidak akan terlepas dari dorongan, bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak.

Pada peristiwa yang sangat membahagiakan ini perkenankan saya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada siapa saja yang saya merasa berhutang budi.

Pertama-tama saya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas kepercayaan yang dilimpahkan kepada kami untuk memangku jabatan Guru Besar, suatu jabatan akademik tertinggi dalam kehidupan Universitas.

Kepada Saudara Rektor/Ketua Senat, para anggota Senat, para Pembantu Rektor saya menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas dorongan, bantuan serta persetujuannya untuk diangkat menjadi Guru Besar di Fakultas Ekonomi.

Kepada Saudara Dekan dan seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi disampaikan pula terimakasih atas kerjasamanya selama ini.

Penghormatan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Bapak-bapak yang telah memberi pendidikan dan bimbingan sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

Kepada Mantan Rektor Bapak dr. A Suroyo dan almarhum Prof. Sudarto, S.H. disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan bimbingannya.

Secara khusus disampaikan pula ucapan terimakasih kepada Prof. Dr. Bambang Riyanto teman sejak menjadi mahasiswa atas perhatian dan dorongan yang tulus ikhlas.

Hadirin yang saya muliakan,

Pada kesempatan yang bahagia ini saya menyampaikan hormat dan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas kesempatan yang diberikan guna menimba pengalaman praktek tentang pembangunan daerah melalui kegiatan perencanaan pembangunan daerah.

Kepada Pemerintah Tingkat II di Jawa Tengah disampaikan pula ucapan terimakasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengenali pembangunan pedesaan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata. Khusus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang disampaikan ucapan terimakasih atas kerjasama dalam pengembangan 'Taman Teknologi Secang' sebagai suatu konsepsi peranan Universitas (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dalam pembangunan pedesaan. Dalam hubungan ini tidak lupa disampaikan terimakasih kepada para Kepala Desa, khususnya Desa Donomulyo tempat diadakan percobaan energi air dan energi surya dan Desa Bulak Baru (Kabupaten Jepara) tempat mengadakan percobaan pengembangan wilayah pantai.

Kepada KORPRI Propinsi Jawa Tengah yang banyak memberi pengalaman tentang aparatur pembangunan di daerah, dan Perguruan Tinggi Swasta yang memberi pengalaman tentang peranan Perguruan Tinggi Swasta dalam pembangunan daerah Jawa Tengah disampaikan pula penghargaan dan terimakasih.

Kepada saudara Drs. Basuki Suwardo MS dan saudara Drs. Dwisetyo Purwono, MSc yang banyak membantu perkuliahan dan pengembangan Ekonomi Publik, Ekonomi Regional dan Ekonomi Perkotaan serta pengembangan kajian pembangunan daerah disampaikan ucapan terimakasih. Banyak yang masih harus kita kerjakan untuk masa mendatang, manakala kita mengembangkan ilmu pengetahuan untuk mengabdikan kepada tanah air. Pengembangan ilmu ekonomi pada hakekatnya adalah guna kepentingan masyarakat bangsa seperti yang diajukan oleh Joan Robinson sebagai berikut: 'The very nature of economics is rooted in nationalism' (Economic Philosophy, hal.117).

Hadirin yang saya muliakan,

Izinkanlah saya menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari isteri saya kepada Bapak Rektor/Ketua Senat yang telah berkenan mewisuda anak yang pertama sebagai sarjana teknik sipil, anak yang kedua sebagai sarjana ekonomi dan anak yang ketiga sebagai sarjana hukum serta pada hari ini berke-



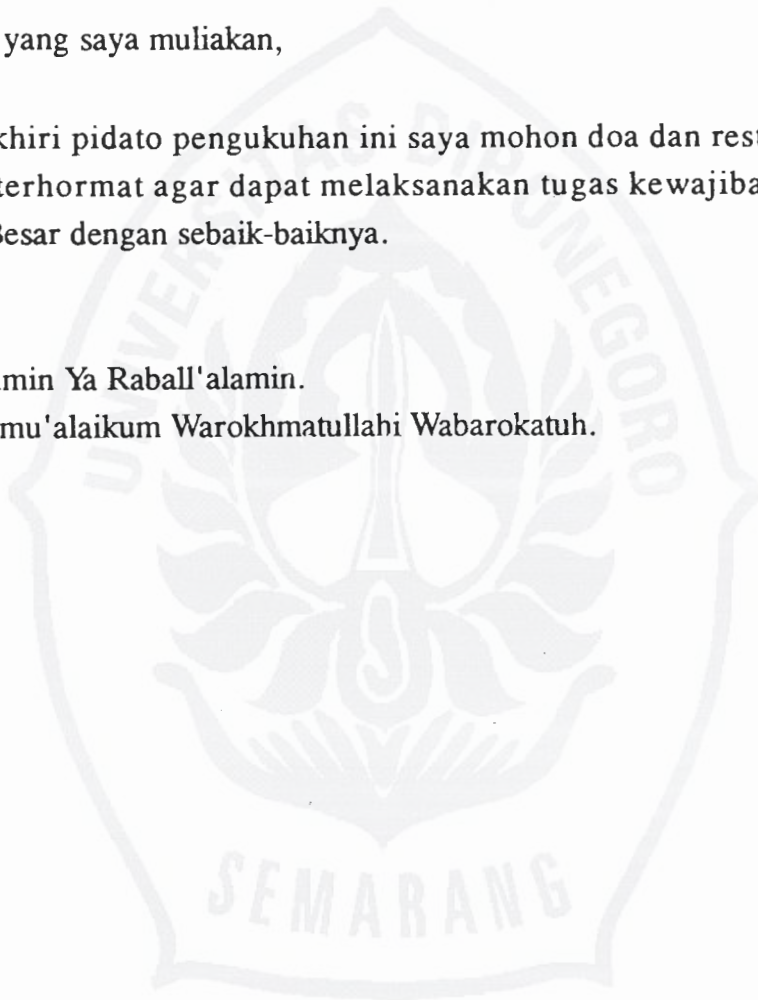
nan mengukuhkan suaminya sebagai Guru Besar dilingkungan Universitas Diponegoro. Suatu peristiwa yang akan terkenang sepanjang masa.

Hadirin yang saya muliakan,

Mengakhiri pidato pengukuhan ini saya mohon doa dan restu hadirin yang terhormat agar dapat melaksanakan tugas kewajiban sebagai Guru Besar dengan sebaik-baiknya.

Amin, Amin Ya Raball'amin.

Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh.



## DAFTAR RUJUKAN

### I

Paul A Samuelson, ECONOMICS Twelfth Edition, Mc Graw Hill, 1985

Richard G Lipsey, ECONOMICS, Seventh Edition, Harper & Row, Publisher, New York, 1984.

Stanley Fischer, ECONOMICS, Mc Graw Hill, 1983

### II

Bernard P Herper, Modern Public Finance The Study of Public Sector Economics, Richard D Irwin, Inc, 1971.

Jesse Burkhead, Government Budgeting, John Wiley & Sons, Inc, 1959

Richard A Musgrave, Public Finance In Theory and Practice Second Edition, Mc Graw Hill, 1976.

Soehardi, Kebijaksanaan Fiskal dan Pembangunan, 1989, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

### III

Emil Salim, Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan, Yayasan Idayu, Jakarta, 1980.

Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan, 1985, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, BIMAGRAFIKA

Sadono Sukirno, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah, Lembaga Penerbit F.E U.I , 1985

Sardi J., Peranan Kota Kecil Dalam Pembangunan Pedesaan, EKI. Vol. XXXI No.2 June 1983

Shinichi Ichamura, Pembangunan Ekonomi Indonesia Masalah dan Analisis, 1989, U.I Press

Siola FX.,Drs, Materi Pembangunan dan Pengembangan Desa Terpadu Dalam Negara Berkembang, Usaha Nasional Surabaya-Indonesia.

Zulkarnaian Djamin, Pembangunan Ekonomi Indonesia Sejak Repelita Pertama, 1984, Lembaga Penerbit F.E U.I.

Prisma, Nomor Pembangunan Daerah, No.2, Pebruari 1972.

-----, Buku Repelita I,II,III,IV,V

-----, Pidato Pertanggungjawaban Presiden Mandataris M.P.R R.I, 1978,1983,1988

World Bank, World Development Report 1988

#### IV

David L.Mc. Kee, Regional Economics Theory and Practice, 1970, The Free Press, New York

Edgar M Hoover, Pengantar Ekonomi Regional (Suatu terjemahan), 1977, Lembaga Penerbit F.E U.I.

Fu Chen Lo/Kamal Solih, Kutub-kutub Pertumbuhan dan Kebijakan Regional di Dalam Sistem Ekonomi Dualistik yang

Terbuka Teori Barat dan Kenyataan di Asia  
(terjemahan), 1976, Lembaga F.E U.I.

Hal Hill, Unity and Diversity Regional Economic Development in Indonesia Since 1970, 1989, Oxford University Press.

Harry W. Richardson, Elements of Regional Economics, 1970, Penguin Books INC USA.

John Blunden, Christopher Brook, Geoffrey Edge and Alan Hay, Regional Analysis and Development, Harper & Row Ltd, London.

John Friedman and Clyde Weaver, Territory and Function, 1979, University of California Press.

John Friedman and Mike Douglass, Pembangunan Agropolitan Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia, 1976, Lembaga Penerbit F.E U.I

Jos G.M. Hilhost, Regional Planning, 1971, Rotterdam University Press.

Kadariah, Ekonomi Perencanaan, 1985, Lembaga Penerbit F.E. U.I.

L Needleman, Regional Analysis, 1972, Penguin Books USA Paul Sitohang, Pengantar Perencanaan Ekonomi Regional, terjemahan, 1977, Lembaga Penerbit F.E. U.I.

Prijono Tjipto Herijanto, DR, Prespektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional, 1987, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Robert Riddell, Regional Development Policy, 1985, St Martin's Press, Inc, New York.

- Sjafrizal, Ekonomi Regional Suatu Perkembangan Dalam Ilmu Ekonomi, EKI Vol. XXI, No.2, June 1983.
- Sjafrizal, Pola Kebijakan Pembangunan Wilayah di Indonesia: Suatu Gagasan, EKI Vol. XXXII No.3, September 1984.
- Soehardi, Menyimak Beberapa Aspek Pembangunan Daerah (Relevansi, Manfaat dan Permasalahannya), Media Ekonomi dan Bisnis/MEB. Vol.I/No.Perd/Mei 1989.
- Tormod Hermansen, Interregional Allocation of Investment for Social and Economic Development, UNSRID = Report No.70 A. Geneva, 1970
- Uppal J. /Budiono Sri Handoko, Regional Income Disparities in Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia (EKI Vol. XXXIV No.3, 1986)
- William Alonso, Ketidak Seimbangan Kota dan Daerah Dalam Perkembangan Ekonomi, EKI Vol. XXVII No.2, September 1979

## V

- Daniel R. Fusfeld, The Age of The Economist Ideas That Shape The Way We Live, 1970, Ladder Edition.
- John W. Mc. Connel, Ideas of The Great Economist, 1980, Barnes & Noble Book Edition.
- Joan Robinson, Economic Philosophy, 1970, Penguin Books
- Landreth, Colander, History of Economic Theory, Second Edition, 1983, Houghton Mifflin Company.

Richard T. Gill, Evolution of Modern Economics, 1972, Prentice-Hall of India Private Limited New Delhi.

Robert B Ekelund, Jr/Robert F. Hebert, A History of Economic Theory and Method, Second edition, 1983, Mc. Graw-Hill International Book Company.

Soehardi, Melacak Dasar-dasar Pemikiran Ekonomi, Pidato Dies Natalis Universitas Diponegoro ke 27

## VI

Milton Esman, Institutional Building As A Guide to Action

Brian Van Arkadie, The Role of Institutions in Development, 1989, The World Bank Annual Conference on Development Economics

Arturo Israel, Institutional Development Incentives to Performance, 1987, The John S Hopkins University Press,

## RIWAYAT HIDUP

- I. Nama : Soehardi  
Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 17 Desember 1927  
Nama Istri : Sri Salamah  
Anak-anak : Ir. Agus Purwadi Hardiatmojo  
: Rahayu Hardiyanti, SE  
: Raharjo Hardiyanto, SH  
Cucu-cucu : Nur Fitri Rahayuning Pertiwi (Fitri)  
: Kartika Putri Sekaring Pertiwi (Tika)  
: Astrinita Gita Aristiyanti (Astrid)
- II. Pendidikan :
- Tahun 1941 : Tamat HIS (SD) di Boyolali  
Tahun 1945 : Tamat SMP di Surakarta  
Tahun 1948 : Tamat SMA di Surakarta  
Tahun 1961 : Tamat Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada  
di Yogyakarta
- III. Pengalaman Kerja :
- Tahun 1955 Guru SMA V C di Yogyakarta  
Tahun 1962 Asisten Ahli Fakultas Ekonomi UNDIP  
Tahun 1962-1965 Dekan Fakultas Ekonomi UNDIP

## V. Lain-lain

- Tahun 1978-1983 Anggota Tim Pembinaan Pengabdian Pada Masyarakat (TP2M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Tahun 1980-1984 Sekretaris III Pusat Ilmiah dan Pembangunan Regional Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Tahun 1987-1988 Anggota Tim Kelembagaan, Ketenagaan, Sarana dan Prasarana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi).
- Tahun 1987-1988 Anggota Dewan Pertimbangan GOLKAR Jawa Tengah.
- Tahun 1975 Ketua II Tim Penyusun Pola Dasar dan Rencana Pembangunan Jawa Tengah.
- Tahun 1978 Anggota Tim Penyusun Repelitada III Jawa Tengah.
- Tahun 1983 Ketua Tim Pendamping Penyusunan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelitada IV Jawa Tengah.
- Tahun 1988 Ketua Tim Pendamping Penyusunan Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelitada V Jawa Tengah.



VI. Penghargaan :

--- Satyalencana Karya Satya Kelas II

--- Duapuluh Lima Tahun Pengabdian Pada Universitas Diponegoro

